

TINJAUAN ATAS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

RADIATUL HIKMAH

Program Studi D3 Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Makassar

Jl. A. P. Pettarani Makassar

Email : radyasyah@gmail.com

SUMMARY

RADIATUL HIKMAH. 2021. Review of the Realization of Regional Revenue and Spending Budget at the District Financial Management Agency Enrekang. Adviser: Prof. Dr. H. Muhammad Azis, M.Si and Samirah Dunakhir, SE.,M.Bus.,Ph.D.,Ak.,CA.

This research aims to find out how the comparison of regional revenue and spending budgets with those that have been realized at the Enrekang District Financial Management Agency by comparing regional revenue and spending budgets with the realization of regional revenues and expenditures over the past 3 years. This research aimed to know the cash sales accounting system for recording procedures and reporting sales at Kalla Toyota Trust Makassar. The variable of this research is the cash sales accounting system of Kalla Toyota Trust Makassar. The population of this research is Report on The Realization of Revenue and Expenditure Budget of Kab. Enrekang. The sample of this research is Data and documents relating to APBD realization report 2017-2019. The data were collected by documentation. The data obtained were analyzed using descriptive analysis. The results of this research The results of this study indicate that the Regional Financial Management Agency Kab. Enrekang regarding the Comparison and analysis of the Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget, shows that the revenue performance has not yet reached the target but is included in the effective category, this can be seen from the smaller amount that is realized than the budgeted one. Meanwhile, the performance of local government spending in Enrekang Regency is considered to be able to save the budget very efficiently. This can be seen from the absence of realization figures that exceed the targeted budget.

Keyword: Report on the Realization of Regional Budget, Revenue and Expenditure.

RINGKASAN

Tinjauan Atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing Oleh Bapak Prof.Dr. H. Muhammad Azis, M.Si. dan Ibu Samirah Dunakhir,S.E.,M.Buss.,Ph.D.,Ak.,CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan yang telah terealisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dengan membandingkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah selama 3 tahun terakhir. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kab. Enrekang. Sampel yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah Data dan dokumen yang berkaitan dengan Laporan Realisasi APBD tahun 2017-2019. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yakni mendeskripsikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang mengenai Perbandingan dan analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum mencapai target namun termasuk dalam kategori efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja pemerintah daerah Kab.Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien. Hal ini terlihat dari tidak adanya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang ditargetkan.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Selain itu Pemerintah daerah juga berperan dalam mengatur dan mengelola roda pemerintah di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah harus mampu dan lebih aktif dalam mengelola daerahnya serta mengoptimalkan segala sumber daya yang baik (good governance), pemerintah melakukan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam laporan keuangan.

Setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (disclosure) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi suatu keputusan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Jika anggaran tersebut tidak memperhatikan kepentingan publik, maka sangat tidak adil untuk masyarakat.

Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan good governance. Laporan Ralisasi Anggaran(LRA) mempunyai peran yang sangat penting dibandingkan dengan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Adapun unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berupa pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan. Dengan adanya LRA nantinya akan berguna bagi atau para pembaca laporan keuangan dalam membuat analisis kinerja pada laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan.

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan, dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Laporan Realisasi Anggaran sebagai alat ukur finansial dinilai mampu menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Salah satu komponen yang merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran adalah komponen belanja daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah .

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dokumen anggaran daerah disebut juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter(Nilai Uang) untuk jangka

waktu (Periode) tertentu yang akan datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD. Dimana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif .

Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran harus diakui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus/proses anggaran daerah tersebut .

Berikut disajikan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang selama 3(tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai pada tahun 2019 .

Tabel 1 Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Enrekang selama 3 tahun (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2017	1.057.719.428.195.00	1.000.408.602.312.37	946.980.202.776.00	867.484.570.752.00
2018	1.088.923.277.552.00	1.014.028.741.574.23	1.086.284.012.289.00	1.006.485.625.084.78
2019	1.159.314.356.011.00	1.064.637.616.007.58	1.165.226.745.882	1.050.617.490.496.42

Dari tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa terkadang anggaran pendapatan dan belanja daerah itu tidak sesuai dengan realisasinya, dari tahun ke tahun anggaran dan realisasi pendapatan

dan belanja daerah terus mengalami peningkatan. Sehingga pemerintah daerah dituntut mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah yang semakin baik, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib agar betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul **“TINJAUAN ATAS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG”** .

METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional

Realisasi APBD adalah kinerja atau hasil rencana kegiatan pemerintah daerah yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dan dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan target maksimal untuk suatu periode anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang selama 3 tahun terakhir.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data dan dokumen yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data penting kegiatan yang berkaitan dengan keadaan dan operasional dari objek penelitian. Dokumentasi ini berupa catatan-catatan transaksi atau laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang 3 tahun 2017, 2018, dan 2019.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif. Menurut Kuncoro (2013) menyatakan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk dianalisis dengan menggunakan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Enrekang.

Rancangan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni mendeskripsikan dan menganalisis data dari kantor yang meliputi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Enrekang dengan Realisasi APBD selama 3 tahun terakhir untuk mengetahui dan mengevaluasi keefektifan keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun pembahasan dari hasil penelitian tugas akhir yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Enrekang ialah sebagai berikut:

1. Efektif Pendapatan daerah

Efektif menunjukkan sampai dimana tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektif menurut Hidayat, “Efektif adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu yang telah tercapai dimana semakin besar persentase target maka semakin tinggi efektifnya”.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisien Pendapatan 2017} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \\ &= \frac{1.000.408.602.312,37}{1.057.719.428.195,00} \times 100 \end{aligned}$$

$$= 94,58 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisien Pendapatan 2018} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \\ &= \frac{1.014.028.741.574,23}{1.088.923.277.552,00} \times 100 \\ &= 93,12 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisien Pendapatan 2019} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \\ &= \frac{1.064.637.616.007,58}{1.159.314.356.011,00} \times 100 \\ &= 91,83\% \end{aligned}$$

Tabel 10. Kriteria Tingkat Efektif Penerimaan PAD

Kategori	Predikat
Sangat efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	< 60%

Sumber: (Mohamad Mahsun:2006. Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996)

2. Efisien Belanja Daerah

Rasio efisien belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah

daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007: 152).

Efisien Belanja dapat diukur menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

Sumber: (Mahmudi, 2007: 152)

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisien Belanja 2017} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \\ &= \frac{867.484.570.752,00}{946.980.202.776,00} \times 100 \\ &= 91,60 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisien Belanja 2018} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \\ &= \frac{851.212.348.167,78}{930.993.465.189,00} \times 100 \\ &= 91,43 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisien Belanja 2019} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \\ &= \frac{876.831.685.900,42}{991.440.940.286,00} \times 100 \\ &= 88,44 \% \end{aligned}$$

Tabel 11. Kriteria Tingkat Efisien Belanja Secara Umum

Kategori	Predikat
Sangat efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup efisien	80%-90%
Kurang efisien	90%-100%
Tidak efisien	>100%

Sumber: (Mohamad Mahsun:2006. Depdagri Kepmendagri No. 690.900.327Tahun 1996)

Rasio efektif pendapatan asli daerah ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (yang dianggarkan) pendapatan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target. Berikut ini tabel perhitungan Efektif Pendapatan Daerah Kab. Enrekang:

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa jika anggaran pendapatan lebih tinggi daripada realisasi pendapatan maka menghasilkan selisih bertambah. Semakin besar tingkat realisasi pendapatan dibandingkan dengan target yang dianggarkan, maka semakin tinggi tingkat efektifnya, sedangkan anggaran belanja berbanding terbalik dengan anggaran pendapatan. Jika anggaran belanja lebih besar daripada realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mampu mengefisienkan belanjanya, dari itu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektif pendapatan dari pemerintah Kab. Enrekang T.A 2017-2019 belum mencapai target namun sudah mencapai kategori efektif karena berada pada predikat 90%-100%, hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah realisasi anggaran pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2017-2019 yaitu sebesar 94,58%; 93,12%; dan , 91,83%.
2. Tingkat efisien belanja dari pemerintah daerah Kab. Enrekang periode 2017-20 19, Pemerintah kabupaten Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien, hal ini terlihat dari tidak adanya angka yang melebihi anggaran belanja, yang mampu menghemat anggaranbelanja sebesar 24,22%; 21,19%; 24,46%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah daerah Kab. Enrekang sebagai berikut:

1. Pemerintah Kab. Enrekang harus lebih berusaha lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak dengan memaksimalkan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), serta mengembangkan potensi-potensi baru yang ada di daerah Enrekang karena ini akan sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan serta menunjang sebagai daerah otonomi yang mampu mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer.
2. Sedangkan pada tingkat efisien belanja Pemerintah Kab. Enrekang disarankan untuk tetap mempertahankan penggunaan anggaran belanja secara hemat sehingga bisa selalu tercapai target efisien belanja dan tidak bergantung pada belanja transfer dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012 . *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010)
- Dr.Dwi Ratmono,M.Si,.Ak., CA , Mahfud Sholihin, Ph.D, Ak.CA.
2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI,II* . Jogjakarta :
UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*,
Edisi pertama , Jakarta: Salemba empat.
- Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara*
- Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No.PER-57/PB/2013 tentang
pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga*
- Rudianto., (2009), *Akuntansi Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan
Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*, Edisi Terbaru: Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, (Bandung : Fokusindo Mandiri,2013).